



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 02 Februari 2013

Halaman: 1

Media Massa : **Bernas** Hari : **Sabtu** Tanggal : **2 Feb 2013** Halaman : **1**

Wajib Pajak Bisa Minta Keringanan

SERAHKAN SPPT PBB -- Sekda Kota Jogja Dra Hj Titik Sulastri secara simbolis menyerahkan SPPT PBB kepada Camat Umbulharjo Drs Agus Winarto, Jumat (1/2) siang. Penyerahan tersebut menandai dimulainya pendistribusian SPPT PBB kepada para wajib pajak tahun 2013.

Wajib Pajak

Sambungan dari halaman 1

dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Drs Kadri Trenggono kepada **Bernas** mengatakan jumlah SPPT PBB di tahun 2013 sebanyak 90.787 lembar dengan nilai potensi pajak sebesar Rp48,972 miliar.

Nilai sebesar itu merupakan pemasukan terbesar kedua bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran.

Meski tergolong besar, Kadri mengakui sering terkendala saat melakukan penarikan pajak.

Sistem *self assesment* yang dianut oleh Indonesia, kerap kali menimbulkan kecenderungan WP melunasi kewajiban menjelang jatuh tempo.

"Ada juga wajib pajak yang tidak terburu membayar atau terlambat," katanya.

Kesulitan lain yang ditemui Pemkot Jogja adalah WP yang tidak berdomisili di Jogja.

"Sulitnya kalau di luar kota, seperti punya bisnis di Jakarta. SPPT PBB sering terlambat diterima karena baru beberapa bulan sekali pulang ke Jogja," jelasnya.

Bentuk tim

Ia menyebutkan untuk mengurangi potensi keterlambatan penerimaan PBB, DPDPK Kota Jogja berupaya membentuk Tim Penagihan serta Pemantauan Penyerahan SPPT PBB.

Kadri juga berencana mengadakan pembayaran masal PBB di Pendapa Balakota Timoho serta mengadakan pembayaran PBB dengan sistem jemput bola di Rukun Warga (RW) dan 45 kelurahan yang ada.

Untuk menyebarluaskan batas waktu pembayaran, DPDPK juga akan memasang puluhan spanduk imbauan pembayaran PBB di seluruh kecamatan yang ada.

"Kita juga akan membuka loket pembayaran PBB di kecamatan saat mendekati jatuh tempo dengan menerjunkan petugas PBB untuk memantau Pos PBB di bank-bank yang ditunjuk untuk melayani pembayaran PBB warga," tambahnya.

Kadri juga menjelaskan pihaknya akan terus berusaha melakukan langkah sosialisasi dengan penyuluhan di tingkat kelurahan dan memanfaatkan media massa lewat acara interaktif dengan para WP.

Pengurangan

Dirinya mengakui adanya kemungkinan masyarakat mengajukan pengurangan pembayaran PBB, karena dirasa tidak mampu membayar sesuai perhitungan.

Pengurangan ini akan diproses selama tiga bulan setelah SPPT PBB diterima oleh wajib pajak yang batas akhirnya 31 Maret 2013.

"Jika merasa keberatan silakan masyarakat mengajukan permohonan pengurangan. DPDPK akan melakukan penelitian setelah mendapat pengajuan pengurangan dari masyarakat, untuk menentukan seberapa besar pengurangan PBB diberikan," terangnya.

Meski demikian, Kepala DPDPK ini menjelaskan tetap akan ada limit dispensasi yang diberikan. "Biasanya kita bisa memberikan keringanan dari 10 persen hingga maksimal 75 persen dari nilai PBB yang harus dibayarkan," ujar Kadri.

Menurut dia para WP yang sering meminta peringanan pembayaran PBB ini biasanya berasal dari keluarga yang kurang mampu seperti keluarga miskin pemegang kartu KMS, janda, duda atau para veteran.

Menurut Kadri batas penyampaian SPPT PBB tahun 2013, pada tanggal 31 Maret 2013. Sedangkan jatuh tempo pembayaran PBB tahun 2013 kepada WP yaitu pada tanggal 30 September 2013.

Pada kesempatan siang kemarin, Titik juga menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada Pimpinan Bank BPD DIY cabang Senopati, Muhammad Anan.

(ros)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005